C. Analisis Data

1. Kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan melalui Komunikasi, Advokasi/ pendampingan, dan Konsultasi

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pantai utara Jawa Timur dengan panjang garis pantai membentang sepanjang 47,162 Km, memiliki 5 tempat pendaratan ikan, yaitu Weru, Brondong, Kranji, Labuhan, dan Lohgung dengan pusat pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Nasional Brondong. Berdasarkan data BPS yang tertuang pada Lamongan dalam angka, produksi perikanan sektor laut Kabupaten Lamongan pada tahun 2012 mencapai 69.216,00 ton dengan nilai produksi Rp. 806,3 miliar. Produksi ikan sektor laut yang dihasilkan dari tahun 2006 hingga 2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,58%. Sedangkan pada sektor perikanan darat Kabupaten Lamongan pada tahun 2012 mampu memproduksi 40.241,965 ton dengan nilai ekonomi mencapai Rp. 703,4 miliar.

Keberadaan potensi sumberdaya laut Kabupaten Lamongan yang memadai dan peluang ekonomi yang dapat dikembangkan, maka Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang layak ditetapkan sebagai lokasi/kabupaten pelaksanaan KIMBis dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan. Dipilihnya desa Weru Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan sebagai lokasi KIMBis disebabkan oleh adanya potensi perikanan laut namun belum mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat pesisir khususnya masyarakat miskin. Berdasarkan profil desa Weru tahun 2012, desa Weru merupakan salah

satu sentra perikanan laut dan pengolahan di Kabupaten Lamongan akan tetapi masih menggunakan teknologi yang sederhana dan nilai tambahnya kurang, total kepala keluarga desa Weru sejumlah 1.318 KK (kepala keluarga), maka jumlah penduduk mencapai 4.882 jiwa dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan adalah 4.393 jiwa, armada penangkapan ikan digunakan pada umumnya berukuran <5GT sehingga sangat terbatas jangkauan dan jelajahnya. Sedangkan pada bagian penghasilan, pendapatan kepala keluarga sebesar Rp. 700.000,- maka tingkat kesejahteraan penduduk masih cukup rendah yaitu 20,8% dari total KK (kepala keluarga).

Oleh karena itu maka pada tanggal 12 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) Nomor 12.1/BALITBANGKP/RS.210/I/2012 tentang pembentukan Klinik IPTEK Mina Bisnis dalam mendukung program Peningkatan Kehidupan Nelayan, desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan KIMBis. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya Naskah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dengan Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Balitbang-KP) Nomor 24.1/BBPSEKP/ TU.330/2012 tertanggal 24 Mei 2012 tentang Operasionalisasi Klinik IPTEK Mina Bisnis untuk Diseminasi dan Pengawalan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang-KP) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan, bahwa sejak desa Weru ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan KIMBis dan dalam rangka menjalankan kegiatan tersebut, pihak BBPSEKP dan pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan SKPD terkait dan kelompok masyarakat nelayan di kawasan Weru komplek yang terdiri dari 4 desa (desa Weru, Paloh, Waru Lor, dan Sidokumpul).

Sejauh ini koordinasi dan komunikasi untuk mensosialisasikan keberadaan KIMBis telah dilakukan formal sebanyak dua kali. Dalam koordinasi dan pertemuan formal yang dilaksanakan oleh pihak BBPSEKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka mengenalkan dan memberikan pemahaman tentang keberadaan KIMBis, maksud dan tujuan pembentukan KIMBis, dan rencana kegiatan KIMBis kepada SKPD terkait dan masyarakat luas di Kabupaten Lamongan. Pertemuan formal dilakukan pertama dalam rangka penandatanganan naskah perjanjian kerjasama pada tanggal 24 Mei 2012 di *Grand* Hotel Mahkota Kabupaten Lamongan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda bagian perekonomian, Diskoperindag, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan masyarakat, *stakeholders* terkait, pengurus KIMBis, dan Inisiator dari BBPSEKP. Pertemuan formal kedua dilaksanakan dalam rangka pengukuhan KIMBis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 31 Maret 2012 di Pondok Pesantren Sunan Drajad Kecamatan Paciran yang dihadiri masyarakat kelautan dan perikanan Kabupaten Lamongan dan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selain upaya komunikasi secara formal dilakukan oleh pihak BBPSEKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) juga melakukan komunikasi bersifat formal dan tidak formal pada beberapa kegiatan perikanan di Kabupaten Lamongan. Secara formal KIMBis dikenalkan kepada tokoh masyarakat, kepala desa, kecamatan, dan penyuluh. Sedangkan secara tidak formal dilakukan melalui rapat-rapat RT, PKK, RN, kelompok pembudidaya, kelompok garam, dan kelompok pengolahan dengan menginformasikan mengenai keberadaan KIMBis ataupun maksud dan tujuan program/kegiatan. Keberadaan KIMBis di Kabupaten Lamongan tidak dapat dipisahkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (P2HP) antara lain karena lokasi studi merupakan sentra pengolahan hasil perikanan laut di Kabupaten Lamongan dan sejak awal kegiatan yang dapat dilakukan adalah fokus berupa pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan kelautan.

a. Kegiatan Komunikasi pada KIMBis Sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Beroperasinya KIMBis di Kabupaten Lamongan dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan, komunikasi menjadi salah satu komponen yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) BBPSEKP menunjukkan, bahwa Klinik IPTEK Mina Bisnis adalah wadah komunikasi, advokasi/pendampingan, serta konsultasi antara kelompok masyarakat nelayan yang beraktivitas di daerah pesisir dengan

stakeholders terkait, melalui pendekatan *technopreneurship* untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat nelayan. Lebih lanjut, Klinik IPTEK Mina Bisnis dapat menjadi bagian atau cikal bakal dari pengembangan kegiatan dalam bentuk kerjasama melalui *Research Extension Fisheries Community Network* (REFINE). Pada kegiatan REFINE tersebut, peneliti – penyuluh – pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan, pengolah, pedagang, dan investor) melakukan kegiatan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat melalui intervensi paket teknologi Badan Litbang Kelautan dan Perikanan yang terpilih, membangun jaringan kerja, dan renovasi paket teknologi yang diintroduksi.

Melalui hal di atas, komunikasi diantara kelompok masyarakat nelayan di daerah pesisir dengan *stakeholders* terkait diharapkan mampu mewujudkan ekonomi berkembang dan kemandirian kelompok masyarakat nelayan melalui intervensi paket teknologi Balitbang-KP. Pemahaman BBPSEKP terkait pentingnya interaksi dan partisipasi aktor baik pemerintah, warga negara ataupun swasta dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan ini sejalan dengan pendapat Mardikanto dan Soebiato (2012:82) yang mengatakan bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri, melainkan juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya. Selaras dengan hal tersebut, Raco dan Imrie (2000) menjelaskan bahwa pada konteks *governance*, partisipasi hendak menempatkan masyarakat pada posisi yang sebenarnya dimana masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah tetapi sebagai teman sejajar (*partner*) pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Melihat hal ini, upaya

penanggulangan kemiskinan dan industrialisasi perikanan di kawasan nelayan dengan membentuk KIMBis adalah menjadi salah satu *implementing agency* program peningkatan kehidupan nelayan di berbagai wilayah Indonesia atas inisiasi BBPSEKP, termasuk di Kabupaten Lamongan. Kerangka berfikir BBPSEKP terkait perlunya agen (*agency*) yang dioperasikan di lapangan dengan bertindak menggerakan dan meyebarluaskan proses perubahan di masyarakat perikanan dan kelautan ini dilakukan dengan maksud agar menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang memanfaatkan IPTEK serta adopsi teknologi dan umpan balik dalam masyarakat sejalan dengan pendapatnya Giddens (2000:19) bahwa agen dan struktur saling berkait, tindakan yang berulang-ulang oleh agen (aktor) melahirkan struktur, istilah ini disebut oleh ilmuwan sosial sebagai struktur sosial atau kekuatan sosial. Melalui hal tersebut, peran agen dan *stakeholders* kepada kelompok masyarakat nelayan menjadi sangat penting pada kegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan, khususnya pada aspek komunikasi.

Sejauh dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan, tampaknya terjadi *inconsistently* dalam penyampaian dan penjabaran *stakeholders* pada kegiatan KIMBis. Padahal, stakeholders merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari serangkaian aktivitas dan tujuan kegiatan KIMBis. Merujuk kepada Brown *et al* (2001) yang menjelaskan bahwa istilah *stakeholders* atau dinamakan pemangku kepentingan adalah seseorang, organisasi atau kelompok dengan kepentingan terhadap suatu sumberdaya alam tertentu. Melalui definisi tersebut, difokuskannya komponen *stakeholders* atau pemangku kepentingan dalam kegiatan KIMBis di Kabupaten Lamogan akan lebih memungkinkan terjadi peran yang jelas dan

terstruktur. Hal yang teramati di lapangan adalah adanya perbedaan penyampaian dan penjabaran *stakeholders* yang terlibat pada kegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan. Hal ini dapat diamati pada perbedaan pernyataan dari Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pelaksana tingkat lokasi (pengurus KIMBis) kaitannya pelibatan ataupun keaktifan HNSI dan RN pada kegiatan KIMBis. Dengan demikian, dapat dikatakan telah terjadi *missed communication* antara pelaksana lokasi dengan pelaksana tingkat pusat dalam memaknai pentingnya *stakeholders* dalam mengambil peran berharga pada pelaksanaan KIMBis di Kabupaten Lamongan. Hal ini juga dikuatkan dengan tidak adanya susunan ataupun struktur pelibatan *stakeholders* yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan pada kegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan.

Mengkaitkan komunikasi dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berhubungan sangat erat. Kedudukan komunikasi dalam konteks pembangunan adalah menjadi bagian integral dan sebagai variabel instrumen dari pembangunan (Jayaweera dan Anumagama, 1987). Merujuk pada Nasution dalam (Mahmud, 2007:38), bahwa komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan terutama antara masyarakat dengan pemerintah. Melalui hal tersebut, maka dirumuskan oleh Harold D. Lasswell (1960), bahwa unsur komunikasi dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu Siapa/sumber, Pesan, Untuk siapa/penerima, Saluran/media, dan Dampak/efek.

1) Siapa/sumber

Hasil temuan di lapangan menunjukkan, bahwa sejak awal kegiatan kerjasama dilakukan antara Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, tentang operasionalisasi Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) dalam mendukung program Peningkatan Kehidupan Nelayan, maka pihak utama ataupun sumber yang memiliki kepentingan dan kebutuhan untuk berkomunikasi adalah BBPSEKP. Hal ini dikarenakan melalui maksud pembentukannya, KIMBis pada pusat-pusat produksi kelautan dan perikanan dirancang untuk mampu mengakselerasi pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan terutama mendorong percepatan peningkatan produksi, mendukung pengembangan industrialisasi perikanan, mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan, sebagai salah satu *implementing agency* program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN). Melalui hal itu, maka dilaksanakanlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di lokasi kegiatan yang dilakukan oleh tenaga/pelaksana tingkat lokasi antara lain meliputi Manajer KIMBis dan dibantu oleh tiga asisten lapangan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan maksud agar didapatkannya umpan balik kebutuhan teknologi dari masyarakat kepada Balitbang KP, juga merupakan upaya BBPSEKP untuk meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia kawasan Nelayan melalui penyebaran inovasi rekayasa sosial yang dilakukan oleh peneliti Balitbang KP, tenaga penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan, dan partisipasi memadai dari pelaku usaha.

Berdasarkan hal di atas, agar diantara kedua pihak dapat saling berkomunikasi ataupun berinteraksi maka ditetapkanlah tenaga penghubung.

Komunikasi pada kegiatan sesuai petunjuk teknis KIMBis, disebutkan bahwa *liaison officer* (LO) adalah tenaga yang berperan sebagai informan baik dalam kegiatan ataupun penghubung dengan pelaksana pusat. Sejauh dari hasil pengamatan di lapangan, fungsi *liaison officer* tidak nampak dalam kapasitasnya sebagai tenaga penghubung juga *public relation* (PR) dalam memberikan informasi, hal ini dapat diamati dimana manajer KIMBis sejak awal telah menjabat sebagai kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Paciran serta merangkap sebagai penyuluh untuk wilayah Paciran dan Brondong, hal itulah yang menyebabkan keuntungan komunikasi lingkup *stakeholders* sering terjadi dalam aktivitasnya walaupun tidak berada di sekretariat KIMBis. Selain itu, komunikasi dan pendampingan yang dilakukan kepada kelompok masyarakat nelayan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Sehingga peranan komunikasi sehari-hari banyak dilakukan oleh manajer dalam kapasitasnya menjalankan KIMBis dan tanggungjawab jabatan pubik.

2) Untuk siapa/penerima

Kelompok masyarakat nelayan yang menjadi kelompok sasaran dari kegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan ini adalah penduduk desa Weru "kawasan Weru komplek" sebagai masyarakat pesisir yang aktivitas usahanya berhubungan langsung dengan sumber daya perikanan. Aktivitas usaha perikanan tersebut antara lain nelayan, pedagang, dan pengolah ikan (pelaku usaha). Sedangkan kelompok yang dilakukan pembinaan oleh KIMBis di Kabupaten Lamongan adalah kelompok budidaya (tabel 20), kelompok pengolah/pelaku usaha (tabel 21), dan kelompok garam (tabel 22). Keberadaan daftar kelompok

nelayan dan pelaku usaha pembinaan KIMBis tersebut merupakan kelompok nelayan dan pelaku usaha yang sebagian besar terbentuk sebelum adanya KIMBis dan yang terbentuk pada proses kegiatan-kegiatan pelatihan KIMBis.

Terlebih dari itu, fokus utama kegiatan KIMBis Kabupaten Lamongan selama pengamatan di lapangan dilakukan pada aspek pengolahan dan pemasaran. Hal ini dikarenakan pada desa Weru 'kawasan Weru komplek' masih banyak memiliki keterbatasan, namun sebaliknya terdapat potensi besar yang dapat diambil dan di optimalkan. Kendati interaksi berbagai kalangan ini dilakukan dalam pelatihan, sejauh temuan di lapangan bahwa masyarakat Weru Komplek relatif berkesempatan dan bertatap muka dengan *stakeholders* dalam perkembangannya ternyata intensitas itu semakin berkurang. Hal ini dikarenakan, KIMBis dalam kegiatannya telah merambah di kawasan-kawasan di luar lokasi studi dengan menjadi narasumber, *trainer*, dan pendamping di pelatihan-pelatihan sentra budidaya dan garam, cakupan pelatihan hingga ke wilayah di luar lokasi studi ini menyebabkan fokus perhatian utama kegiatan di desa Weru 'Weru komplek' semakin berkurang. Sekalipun *feed back* kelompok nelayan warga desa Weru dari sekian kegiatan pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan dinilai kurang, adanya resistensi masyarakat dan keaktifan mengakibatkan keberlanjutan pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok tidak maksimal, komunikasi dua arah terjadi ketika kegiatan berlangsung saja. Adapun wilayah yang pernah dilangsungkan pelatihan KIMBis untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) produk perikanan berbasis teknologi inovasi antara lain Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Brondong, Kecamatan Karangbinangun,

Kecamatan Glagah, dan Kecamatan Maduran. Sedangkan pada Instansi pemerintahan pernah dilakukan di Diskoperindag dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan.

3) Pesan

Nilai inovasi ataupun teknologi dalam proses pemberdayaan di KIMBis sebenarnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu memecahkan masalah (*problem solving*), bagaimana kelompok mau berserikat sebagaimana nilai yang dijunjung tinggi dari adanya pemberdayaan, sehingga produk-produk inovasi dan teknologi aplikasi tidak dapat dikatakan sebagai nilai akhir dalam sebuah proses pemberdayaan di KIMBis. Terlebih dari itu, KIMBis adalah *role model* pemberdayaan yang dioperasikan sebagai penghubung hasil penelitian dan penerapan teknologi.

Materi (pesan) yang disebarkan dan dibahas pada kegiatan pelatihan meliputi permasalahan umum isu-isu terkini sektor perikanan dan kelautan, peningkatan kualitas produksi, pengembangan sumber daya perikanan, dan diversifikasi hasil perikanan menjadi produk beraneka ragam bernilai ekonomis dan inovatif untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) hasil perikanan. Pada saat pelatihan berlangsung, maka tema/materi dan atau *stakeholders* terkait dihadirkan pengurus untuk memberikan ceramah sesuai tema pelatihan, juga bertindak menjadi narasumber dan pendamping mengikuti tema/materi yang dikehendaki kelompok masyarakat nelayan ataupun masyarakat umum yang jauh hari sudah dipesan, melalui mekanisme permohonan diadakannya kegiatan pelatihan kepada pengurus KIMBis ataupun penyuluh di wilayah kewenangannya.

Pada proses komunikasi terjadi, aspek intervensi inovasi teknologi dari Balitbang KP tidak dapat dipisahkan dari adanya kegiatan pelatihan berlangsung, hal ini dikarenakan sebagian dari ide, gagasan, formula, dan cara yang inovatif yakni diversifikasi aneka hasil olahan yang bermutu didapatkan dari adanya pelatihan di Jakarta dalam rangka temu pengolah yang diikuti dari 4 orang merupakan perwakilan dari KIMBis Kabupaten Lamongan, juga didapatkan dari adanya proses komunikasi oleh pelaksana lokasi (pengurus KIMBis) kepada pelaksana tingkat pusat dan sebaliknya. Meskipun demikian, sejauh ini kepengurusan KIMBis desa Weru telah bergerak mampu untuk mandiri dalam mengelola organisasi/kelembagaan KIMBis dalam rangka pemberdayaan, maka pengembangan kegiatan sejauh dari hasil amatan di lapangan telah dilakukan oleh pengurus tanpa melalui proses berkomunikasi dengan BBPSEKP.

KIMBis desa Weru dalam kegiatannya merupakan bagian dari program peningkatan kehidupan nelayan yang dilakukan dalam konteks pemberdayaan masyarakat nelayan, komunikasi pada penyebarluasan informasi teknologi dan inovasi dilakukan baik lingkup pelaksana pusat kepada pengurus KIMBis maupun pengurus KIMBis kepada kelompok masyarakat nelayan. Perlu diperhatikan, upaya penyebarluasan teknologi ataupun inovasi yang dibutuhkan dan sedang dicapai oleh Balibang KP selain dilakukan di desa Weru, juga dilakukan di wilayah sekitarnya ini dilakukan untuk mengawal dan menciptakan perubahan kebudayaan tradisional sempit masyarakat nelayan ke arah modernisasi dan industrialisasi perikanan dan kelautan. Untuk yang desa Weru karena kegiatan pemberdayaan dilakukan dan bermula di lokasi tersebut yang dirancang untuk

berkembang di lokasi lain di Kabupaten Lamongan, sejauh ini telah berjalan sebagaimana mestinya dengan dikawal pengurus KIMBis. Maka sesuai *road map* pembentukannya, pada tahun 2015 KIMBis di Kabupaten Lamongan harus mandiri tanpa adanya anggaran dan apapun dari BBPSEKP, dan sejauh ini inovasi yang berupa akademis maupun teknis tidak seluruhnya didapatkan dari BBPSEKP, akan tetapi pengurus KIMBis lah yang mengembangkannya. Melihat itu, upaya memandirikan KIMBis yang dilakukan dari, oleh, untuk masyarakat hingga penelitian ini dilakukan telah nampak. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan perekonomian skala usaha kecil menengah (UKM) yang dilakukan secara mandiri oleh pengurus, *stakeholders*, penyuluh, dan pelaku usaha yang berada di lokasi kegiatan.

Konteks intervensi teknologi dan inovasi hasil riset yang disebarkan kepada kelompok masyarakat nelayan, alur komunikasi yang dilakukan pengurus KIMBis sebagai fasilitator menjadi hal yang sangat penting, hal ini berkaitan ataupun menentukan tercapai atau tidaknya kebutuhan dan kepentingan teknologi. Sejauh temuan di lapangan menunjukkan, bahwa tidak ada aturan alur komunikasi yang baku baik bersifat formal ataupun informal, dilakukan lebih sering pada aktivitas pelatihan dan pendampingan melalui penjaringan kebutuhan prioritas. Meskipun demikian, KIMBis dalam memfasilitasi kelompok-kelompok untuk memakai/menerapkan teknologi dan inovasi dari Balitbang KP maupun sumber lain (Dinas Kelautan dan Perikanan), maka pengurus KIMBis selain berperan sebagai fasilitator, juga diterapkannya skala prioritas kemedesakan dan potensi pengembangan pada kebutuhan kelompok tersebut untuk menghindari konflik

kelompok dan *conflict of interest* (konflik kepentingan). Khusus sifatnya inovasi gagasan hasil riset, maka disebarluaskan kepada semua kelompok sasaran melalui pelatihan-pelatihan dan pendampingan. Sejauh ini, dalam rangka intervensi teknologi inovasi, Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi KP (BBPSEKP) bekerjasama dengan partner Balai Besar yang lain sebagai mitranya, misalnya fokus terhadap mutu maka Balai Besar yang berkaitan dengan mutu dihadirkan ke lokasi studi.

Menyadari kedua hal, yaitu KIMBis sebagai fasilitator dan BBPSEKP dalam intervensinya, maka didapati mekanisme penyebarluasan teknologi dan inovasi ke dalam dua model alur komunikasi yang dilakukan. Pertama, inisiatif dari pusat yaitu Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi KP, dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian dan kebutuhan yang pada akhirnya mampu dilakukan masyarakat dan memperoleh hasil. Kedua, hasil prioritas pengurus KIMBis desa Weru, dari sekian kegiatan pelatihan yang dilakukan selanjutnya diadakan penampungan berbagai aspirasi dari kelompok-kelompok dengan perkiraan kebutuhan peralatan, teknologi apa yang sedang dibutuhkan untuk peningkatan produksi, mutu, dan ataupun kualitas. Selanjutnya dilakukan komunikasi dengan pihak pelaksana pusat. Ketika mekanisme pemenuhan kebutuhan teknologi inovasi ini dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan, penjaringan, dan hasil komunikasi kelompok-kelompok nelayan di kegiatan pelatihan-pelatihan, hal selanjutnya adalah dilakukannya skala prioritas dengan alasan kebutuhan mendesak dan KIMBis berperan sebagai fasilitator pengajuan kebutuhan misalnya

inovasi teknologi dan alat yang dapat dikembangkan dikelompok tersebut dengan dilakukan identifikasi potensi saat ini dan di masa depan.

4) Saluran/media

Sejauh ini, saluran/media ataupun ruang komunikasi diantara kelompok masyarakat nelayan dengan *stakeholders* terkait pada kegiatan KIMBis dilakukan pada kegiatan-kegiatan pelatihan. Sehingga, aktivitas komunikasi dan interaksi terbangun secara timbal balik pada pelatihan berlangsung, hal itulah yang menjadi karakter unik dari beroperasinya kegiatan KIMBis ini, *stakeholders* yang menjadi narasumber pelatihan juga didatangkan baik yang berkepentingan di wilayah perikanan dan kelautan ataupun dari masyarakat umum yang telah berhasil di dalam usahanya. Selain pelatihan menjabarkan materi, kegiatan yang biasa dilakukan adalah praktek hasil olahan yang didapatkan dari proses penyampaian materi oleh narasumber. Pengurus mendampingi dengan dibantu oleh penyuluh di lokasi kegiatan. Melihat hal itu, dapat dikatakan keterlibatan peran masing-masing *stakeholders* dengan konteks komunikasi lebih mengikuti situasi kegiatan dan aktivitas pelatihan berlangsung. Kelompok masyarakat nelayan, para pelaku usaha hasil perikanan, dan masyarakat umum relatif berkesempatan dan bertatap muka untuk berkomunikasi terutama dalam bentuk kegiatan pelatihan yang sedang berlangsung, kendati beberapa kesempatan juga dilakukan tidak formal didalam sekretariat KIMBis desa Weru dengan dapat berkonsultasi bersama pengurus KIMBis.

5) Dampak/efek

Efek dari adanya komunikasi yang dilakukan *stakeholders*, pengurus, dan inisiator terbentuknya KIMBis kepada kelompok masyarakat nelayan sejauh ini telah dirasakan manfaatnya, meskipun belum terlalu nampak perubahan kepada industrialisasi perikanan, setidaknya masyarakat menjadi tahu sesuatu hal yang menjadi standar pangan berupa higienitas, mutu, pengemasan, dan jaringan pemasaran. Sejauh ini, wujud inovasi teknologi yang telah diterapkan oleh Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan (BBPSEKP) di kegiatan KIMBis Kabupaten Lamongan, terdiri dari:

1. Sertifikasi PIRT untuk pelaku usaha, dikegiatannya meliputi cara pengolahan yang baik, penerapan pengolahan mulai dari bahan baku hingga pemasaran, pemilahan bahan baku olahan, dan upaya menerapkan prinsip *blue economy* pada setiap proses produksi,
2. Upaya peningkatan kualitas garam tradisional dan inovasi pakan alternatif untuk budidaya ikan lele,
3. Gagasan modernisasi alat pengolahan dari tradisional ke modern, meskipun dalam hal ini dari BBPSEKP belum dilakukan, dan
4. Teknik pemasaran melalui *website*.

Merujuk pada tujuan kedua pembentukan KIMBis, yaitu mempercepat proses penerapan teknologi dan memperoleh umpan balik dari kelompok sasaran untuk memperbaiki teknologi yang diintroduksi. Melalui hal itu, maka teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas dan nilai tambah (*value added*) menjadi upaya yang harus diciptakan dan segera dimasyarakatkan agar bisa segera digunakan oleh masyarakat sasaran KIMBis. Untuk itu diperlukan proses difusi

penerapan teknologi. Menurut Rogers (1964), difusi adalah proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Kembali pada konteks pembahasan sebelumnya, saluran/media yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi adalah pelatihan-pelatihan.

Dalam pendapatnya Mardikanto dalam (Mardikanto dan Soebiato (2012:184), bahwa meskipun strategi partisipatif dapat dinilai sebagai strategi terbaik, sesungguhnya tidak ada strategi pemberdayaan yang selalu efektif dan baik untuk semua penerima manfaat, karena pilihan strategi tergantung motivasi fasilitator dan perlu memperhatikan kondisi kelompok penerima manfaat. Menyadari hal itu, sebenarnya upaya adopsi dan difusi inovasi dari satker Balitbang-KP melalui wadah bentukannya (KIMBis) memungkinkan terjadinya keberhasilan jika memperhatikan motivasi dari fasilitator *agency* (aktor/ agen) yang disebar untuk dioperasikan di lapangan pada kegiatan ini, selain itu juga terutama kepada pola penerimaan masyarakat dari adanya adopsi dan hal-hal baru.

Pada tabel kontinum strategi pemberdayaan dalam penghubung penelitian dan penerapan teknologi (pada tabel 5), terdapat lima karakteristik motivasi dari fasilitator yaitu, bekerja untuk kepuasan fasilitator (*to do for agent*), merekayasa masyarakat (*to do to people*), memasarkan inovasi kepada masyarakat (*to do for people*), bekerja bersama masyarakat (*to do with people*), dan dari, oleh, untuk masyarakat (*to do by the people*). Melalui hal ini, KIMBis sebagai lembaga profesional menjadi pusat kegiatan pemberdayaan sektor perikanan dan kelautan dalam perkembangannya dan harapan di masa yang akan datang adalah dari, oleh,

untuk masyarakat (partisipatif), maka persyaratan dan kondisi masyarakat yang mendukung hal itu antara lain masyarakat sangat inovatif, swadaya masyarakat sangat tinggi, dan masyarakat sangat demokratis. Dengan demikian, kualitas dari kegiatan pemberdayaan dan ketercapaian upaya adopsi dan difusi inovasi akan sangat ditentukan oleh kesungguhan agen-agen yang ditetapkan pada lokasi kegiatan untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut, menyadari hal ini bahwa KIMBis dan kegiatannya merupakan lembaga bentukan BBPSEKP dalam mendukung program Peningkatan Kehidupan Nelayan yang disebar dilokasi yang telah disepakati. Selain itu, komitmen dan relevansi dari adanya kebijakan dan maksud yang dipahami kedua pihak, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dan BBPSEKP selaku inisiator dari kegiatan KIMBis adalah kunci utama dari keberlangsungan kegiatan yang memadai, saling mendukung dan menguntungkan program pembangunan masing-masing. Sejauh dari temuan di lapangan menunjukkan, bahwa ternyata terjadi ketidaksepahaman dan kesepakatan diantara kedua lembaga, maka menjadikan kolektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat (pusat pemberdayaan) di lokasi studi kurang optimal, kejelasan tujuan atau tujuan kurang menarik bagi pihak Pemerintah Kabupaten Lamongan karena penyampaian tujuan pembentukan KIMBis sejak awal adalah *role model* pemberdayaan dimana masyarakat diharapkan mampu memahami permasalahannya, intensitas berkonsultasi dan berkomunikasi datang ke klinik (KIMBis) sebagai wadahnya, akan tetapi nilai adopsi inovasi dan produk-produk hasil perikanan yang lebih dimunculkan oleh BBPSEKP pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, padahal sejak awal pembentukan KIMBis merupakan lembaga

profesional dengan membawa semangat pemberdayaan nelayan yang difungsikan sebagai klinik dimana setiap kelompok nelayan dan masyarakat umum dapat datang dan berkonsultasi di tempat, ibarat orang sakit pergi ke klinik (dokter), melalui hal itu maka konsistensi dan relevansi dari BBPSEKP dinilai kurang oleh Kabupaten Lamongan, dan sanggahan selanjutnya adalah karena Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri juga kurang memahami maksud dan tujuan dari adanya KIMBis dioperasikan di Kabupaten Lamongan.

Sejauh dari hasil temuan di lapangan menunjukkan, bahwa teknologi berupa kebutuhan peralatan fisik guna menunjang kelangsungan produksi pengolahan hasil tangkap di kelompok-kelompok nelayan binaan dan ataupun pelaku usaha di Desa Weru belum nampak, beberapa kesempatan bahkan didapatkan dari sumber lain walaupun dalam kaitannya mendukung KIMBis. Meskipun demikian, yang sifatnya ide, gagasan, formula, dan inovasi sebagian didapatkan dan berasal dari BBPSEKP, khusus anggaran kegiatan terdapat kompromi diantara pelaksana lokasi dan BBPSEKP, akan tetapi gaji pelaksana lokasi menjadi tanggungjawab penuh BBPSEKP hingga awal tahun 2015.

Sejalan dengan hal tersebut, pemahaman BBPSEKP terkait perubahan sosial dari hal-hal baru di luar wujud fisik berupa inovasi tidak jauh berbeda dari pendapatnya Havelock (1973), yang mengatakan bahwa inovasi adalah segala perubahan yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh masyarakat yang mengalaminya. Sedangkan menurut Hubies, *et al*, (1995), bahwa inovasi pembangunan yang perlu di sebarkan terdiri atas dua kelompok, yaitu Inovasi Rekayasa Teknologi, dan Inovasi Rekayasa Sosial. Inovasi rekayasa teknologi

menyangkut berbagai piranti keras yang mendukung pelaksanaan fisik inovasi yang bersangkutan, dan inovasi rekayasa sosial mengacu pada rekayasa kelembagaan, pemikiran ideologis, dan nilai-nilai pendukung kualitas pembangunan manusia.

Melalui hal itu, terdapat dua bentuk teknologi inovasi yang semestinya di sebarkan kepada kebudayaan sosial masyarakat dalam kegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan yaitu berupa piranti keras/fisik dan nilai-nilai pendukung kualitas pembangunan manusia, dalam hal ini adalah perubahan kebudayaan tradisional masyarakat nelayan kearah modernisasi dan industrialisasi perikanan dan kelautan. Hal ini juga dikuatkan dari pendapatnya Erlina, dkk (2010) bahwa penyebaran dan intervensi teknologi bertujuan untuk meningkatkan produksi terutama pendapatan masyarakat sasaran. Salah satu karakteristik teknologi yang disebutkan Erlina dkk adalah dapat meningkatkan produktivitas secara nyata, bukan merupakan komponen-komponen teknologi tetapi merupakan kesatuan utuh, sesuai dengan biofisik, sosial ekonomi, dan budaya.

Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun hingga sejauh ini BBPSEKP belum menstransfer paket teknologi yang dimaksud (Inovasi Rekayasa Teknologi), tetapi teknologi berupa inovasi telah dimanfaatkan pada pelatihan-pelatihan dalam rangka penyebarluasan informasi inovasi hasil riset sebagai peningkatan nilai tambah maupun dalam menjaring aspirasi dari kebutuhan masyarakat dilihat dari potensi dan kekurangannya, pengurus KIMBis lebih banyak melakukan transfer informasi secara timbal balik dengan Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi KP (selaku pelaksana tingkat pusat), berupa formula,

anggaran total kebutuhan kegiatan, inovasi, gagasan, ide, kerangka pikir, dan cara dalam berbagai kegiatan peningkatan kualitas masyarakat nelayan dilihat dari potensi dan keberlanjuatannya yang berbasis IPTEK. Melihat hal tersebut keberadaan peran dalam kebertanggungjawaban Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi KP (pelaksana pusat) secara keseluruhan masih dijalur perlintasannya, artinya Balai Besar selaku inisiator tetap berkomitmen dan bertangungjawab dalam kegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan. Memang dalam banyak hal inovasi rekayasa teknologi wujud piranti/fisik belum disebarluaskan kepada kelompok masyarakat nelayan di kegiatan KIMBis, namun inovasi rekayasa sosial yang sifatnya ide, inovasi, gagasan menjadi kata kunci intervensi, renovasi, dan introduksi sejauh yang diamati di lapangan lokasi pelaksanaan Klinik IPTEK Mina Bisnis di Kabupaten Lamongan.

Pada tujuan kesatu KIMBis beroperasi disebutkan, bahwa KIMBis dirancang untuk mendorong tumbuhnya *entrepreneurship* dalam masyarakat nelayan/pesisir sehingga mampu memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat. Sejauh ini, dampak secara kognitif yang diidentifikasi berupa seseorang menjadi tahu adalah masyarakat pelaku usaha ataupun binaan KIMBis telah mengetahui dan memahami berwirausaha. Misalnya Ibu Hindun Janariyah yang sebelumnya tidak memiliki usaha dengan keikutsertaan dikegiatan KIMBis saat ini telah menjalankan usaha kecil-kecilan olahan hasil perikanan tangkap yang didapatkan dari suaminya sendiri sebagai nelayan, hingga kapasitas penjualan mencapai 25 Kg setiap 3 hari dengan harga per Kg 25 ribu, maka pendapatan tambahan Ibu Hindun per hari adalah Rp. 207.500,00. Memang harga jual ini termasuk termahal

di desa Weru, akan tetapi usaha ini telah memiliki langganan tetap berada di Malang, Tuban, dan lokal di wilayah Kranji, Brondong, dan Paciran.

Selain efek secara kognitif, juga telah berproses kepada terbentuknya sikap. Dalam banyak hal pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh pengurus KIMBis baik secara teknis maupun gagasan, secara umum dilakukan untuk mendorong pelaku usaha agar mampu menjalankan usahanya meskipun di awal belum memiliki usaha pengolahan ini. Sejauh ini, dampak secara afektif dimana terbentuknya sikap ditunjukkan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat pengolah mengenai hal-hal yang dulunya tidak dipahami seperti campuran produksi olahan (STTP), campuran olahan misalnya *baking powder*, *baking soda*, dan telur yang dicampurkan pada adonan kerupuk ikan, serta hal-hal penunjang produksi berupa alat yang lebih memadai, melalui kehadiran pendampingan KIMBis masyarakat menjadi lebih tahu, maka potensi sentra pengolahan hasil laut yang dulunya diproduksi seadanya saat ini berangsur-angsur dilakukan lebih higienis dan lebih profesional baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kemudian, dampak secara konatif yang mana seseorang menjadi bertindak melakukan sesuatu, juga tidak kalah pentingnya, mengenai ini sebagian besar pelaku usaha pengolahan di desa Weru tampaknya telah berproses kepada produksi yang lebih baik, kendati tidak semua warga ikutserta pada kegiatan KIMBis, sebab menganggap kegiatan ini kurang menarik dan tidak menguntungkan usaha pengolahan yang sudah dibangunnya sejak dulu. Melalui ini, maka pengurus KIMBis perlu memperhatikan pola penerimaan masyarakat dari kegiatan ini serta mencitrakan kegiatan ini lebih memungkinkan terjadi efek

yang lebih baik untuk usaha yang sedang dijalankan warga desa Weru sebagai sentra pengolahan tradisional pesisir di Kabupaten Lamongan.

Konteks membangun jejaring/ kerjasama (*network*) yang dilakukan KIMBis di Kabupaten Lamongan merupakan aspek penting untuk diperhatikan, melalui Surat Keputusan pembentukan KIMBis kedepan diarahkan menjadi bagian dari pengembangan kegiatan dalam bentuk kerjasama melaui *Research Extension Fisheries Community Network* (REFINE). Menurut Endarti (2004:4), inti dari kerjasama adalah adanya upaya pencapaian tujuan atau kepentingan dari berbagai pihak (aktor) secara bersama-sama dengan saling melakukan pertukaran sumber daya (*resources exchange*). Syarat keberhasilan sebuah kegiatan kerjasama adalah adanya realisasi tindakan kolektif (*collective actions*) untuk memunculkan tujuan bersama (*common purposes*) dan untuk mengatasi ancaman bersama (*common threats*).

Sejauh dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara menunjukkan, realisasi tindakan yang berbentuk kegiatan kolektif yang diadakan secara inisiatif ataupun mandiri dari tiga pilar aktor, yaitu Peneliti, Penyuluh, dan para Pelaku Usaha agar kehidupan masyarakat menjadi meningkat kualitasnya, hingga penelitian ini dilakukan keadaan yang mendukung kondisi tersebut dilakukan lebih banyak bersifat komunikasi intensif dalam kesempatan-kesempatan pelatihan yang difasilitasi KIMBis.

Melalui hal itu, ruang-ruang komunikasi dalam mendukung terbangunnya jejaring kerjasama adalah dilakukan pada kegiatan pelatihan sekaligus. Dari tiga pilar aktor pengembangan kegiatan kerjasama, ternyata sejauh ini masyarakat

kelompok nelayan ataupun pelaku usaha pada konteks pelatihan lebih banyak memiliki inisiatif dengan maksud agar diadakan pelatihan untuk kelompok mereka, KIMBis berperan sebagai fasilitator, *trainer*, dan pendamping. Secara langsung, Balitbang-KP menyebarluaskan inovasi mereka kepada kelompok masyarakat nelayan di kawasan Weru komplek dengan melihat kesesuaian gagasan di lokasi kegiatan, penyuluh berperan mendampingi dan jika diperlukan berperan menterjemahkan inovasi hasil riset ke dalam kegiatan kelompok ataupun masyarakat berupa pelatihan praktik, dan pelaku usaha selain menciptakan iklim berusaha juga sebagai pihak yang diberdayakan dan ditingkatkan nilai tambahnya. Wujud kegiatan kerjasama kolektif berupa pertukaran sumber daya hasil laut diantara pelaku usaha sejauh ini masih berjalan di tempat, meskipun upaya pengenalan produk telah dilakukan di luar lokasi oleh pengurus KIMBis.

Membangun jejaring dengan SKPD di Kabupaten Lamongan merupakan salah satu bagian dari KIMBis sebagai pusat kegiatan, keterkaitan ataupun sinergitas antar pelaku program pemberdayaan baik sektor pemerintah maupun swasta merupakan upaya efektif dalam mencapai tindakan kolektif kemitraan. Sejauh ini, program yang telah diselaraskan dengan kegiatan pemberdayaan di KIMBis, meliputi:

1. Program alih teknologi berupa teknologi pengolahan dan aspek pasar untuk meningkatkan nilai tambah,
2. Pelaksanaan prinsip *blue economy* dengan konsep *zero waste*,
3. Program PUMP budidaya selaras dengan programnya penyuluh,
4. Program minapolitan menuju industrialisasi perikanan, dan

5. Program peningkatan kehidupan nelayan serta industrialaisasi perikanan yang menjadi wajib untuk diselaraskan.

Sedangkan jaringan kerjasama yang terjalin adalah dengan Universitas Hangtuah Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura, dan Diskoperindag serta PDE (pengolahan data elektronik) Kabupaten Lamongan. Selain dari sejalannya kegiatan KIMBis dengan program Dinas Kelautan dan Perikanan, inisiatif sinergi juga dilakukan dengan program pemberdayaan berupa program PUGAR dan program PUMP budidaya merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Seperti di awal dijelaskan, bahwa upaya pemberdayaan dari BBPSEKP selain di kawasan Weru komplek, juga dilakukan di luar lokasi kegiatan ini. Inovasi yang diterapkan dan kaitannya dengan sinergitas program pemberdayaan antara lain upaya percepatan untuk menghasilkan air tua pada garam dengan mendukung teknologi tepat guna (TTG) kelompok garam Arifin Jamian, dilakukan dengan menambahkan *doping* garam ke air masih muda. Dengan penambahan *doping* garam ini maka dapat mempercepat penuaan air menjadi BE 25 yang merupakan kondisi ideal untuk proses pengkristalan garam. Penggunaan *doping* garam secara total dapat meningkatkan produksi dan kentungan yang diterima petambak garam di Kecamatan Brondong serta adanya transfer teknologi yang dilakukan di kelompok pembudidaya lele di Kecamatan Paciran. Hal tersebut dikarenakan besarnya biaya operasional komponen pakan. Adanya transfer teknologi ini secara kelayakan teknis teknologi pakan mandiri dapat menghasilkan nilai tambah dan hemat, bahan baku yang digunakan untuk pakan

mandiri mudah diperoleh dan harganya murah karena menggunakan limbah ikan yang ada di TPI di Kecamatan Paciran.

Melihat hal di atas, KIMBis telah melakukan dan berupaya mendukung dalam meningkatkan produksi dan produktivitas nilai tambah pada program tersebut. Komunikasi penyelarasan program pemberdayaan masyarakat sektor perikanan dan kelautan berupa PUMP dan PUGAR serta TTG garam, dalam kapasitas KIMBis sebagai kelembagaan yang mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui perkuatan dan relasi pemangku kepentingan. Program PUMP budidaya, dalam bentuk penguatan usaha kelompok dengan memanfaatkan pelatihan dan pendampingan pembuatan pakan ikan berbahan baku limbah (alternatif) dan pembibitan lele. Program PUGAR, melalui sinergitas penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) garam pak Arifin Jamian yang dilakukan untuk mewujudkan swasembada garam. Juga terutama kepada masyarakat di kawasan Weru komplek sebagai lokasi KIMBis beroperasi, dilakukan melalui pendampingan kepada kelompok pengolah baik binaan KIMBis ataupun diluar selaku pelaku usaha hasil tangkap, dengan maksud agar penerapan IPTEK pengolahan hasil perikanan kaitannya pengetahuan dan produktifitas usaha sesuai dengan prinsip *blue economy*.

Sejauh ini, sinergitas program yang ada di tingkat SKPD yang dapat dikoordinasikan dengan kegiatan KIMBis adalah program Rumah Kreatif (KIMBis berperan berupa pendampingan pemasaran berupa *online market*) dan Program Gemerlap (KIMBis berperan berupa pelatihan pengolahan bagi kelompok sasaran dengan sektor perikanan) yang dikawal oleh Bappeda

Kabupaten Lamongan. Meskipun demikian, peran KIMBis belum begitu menonjol dalam mengambil peran berharga di keterlibatannya ini.

b. Kegiatan Advokasi/pendampingan pada KIMBis Sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Selain dari aspek komunikasi menjadi fokus utama pada kegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan yang digunakan baik dari pelaksana pusat kepada pelaksana lokasi maupun pelaksana lokasi kepada masyarakat kelompok nelayan/pelaku usaha, maka aspek yang lainnya adalah berkaitan dengan advokasi/pendampingan. Advokasi/pendampingan merupakan bagian dari kegiatan KIMBis dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan, maka menjadi penting untuk diperhatikan. Pada dasarnya, advokasi merupakan aspek yang melekat pada kegiatan pemberdayaan, karena berkaitan dengan berbagai alternatif penyampaian aspirasi secara hukum dan kebijakan. Metode pendampingan diterapkan dalam mayoritas program sesuai kondisi dan situasi kelompok sasaran yang dihadapi. Menurut Vidhyandika dan Moeljarto (1996:142), bahwa fungsi pendamping sangat penting, terutama dalam membina dan mengarahkan kegiatan kelompok sasaran. Pendamping bertugas mengarahkan proses pembentukan dan penyelengaraan kelompok sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung), dan dinamisator (penggerak).

Hasil temuan di lapangan menunjukkan, bahwa kegiatan advokasi/ pendampingan KIMBis di Kabupaten Lamongan belum merambah pendekatan advokasi bersifat hukum dan kebijakan kepada pemerintah, akan tetapi dilakukan sesuai kapasitas pengurus dan pendampingan yang bersifat rutinitas umum

kaitannya aktivitas pendampingan pada kelompok sasaran dan pelaku usaha. Pendampingan ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut pelatihan dari kegiatan KIMBis Kabupaten Lamongan, dilakukan oleh tim pelaksana di lokasi yang terdiri dari Manajer KIMBis dan Asisten Manajer yang dilakukan kepada pelaku usaha dan kelompok masyarakat nelayan, yaitu kelompok budidaya, kelompok pengolahan, dan kelompok garam di kawasan Weru Komplek.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan, kegiatan advokasi/pendampingan yang dilakukan KIMBis di Kabupaten Lamongan adalah berikut ini:

1) Pendampingan penguatan kapasitas pelaku usaha pengolahan;
2) Pendampingan dan pengurusan sertifikasi PIRT bagi pelaku usaha;
3) Pendampingan peningkatan kualitas usaha pengolahan garam tradisional;
4) Pendampingan dalam rangka transfer teknologi pembuatan pakan buatan dan pemijahan lele;
5) Pendampingan dan fasilitasi permohonan kebutuhan teknologi; dan
6) Pendampingan dalam rangka pembukaan akses terhadap peluang pasar berupa pameran dan pemasaran keliling.

Melalui keenam bentuk kegiatan pendampingan KIMBis di atas, melalui kegiatannya, KIMBis di Kabupaten Lamongan selain bertujuan mempercepat proses diseminasi, adopsi, dan difusi teknologi kelautan dan perikanan dan umpan balik dari masyarakat untuk memperbaiki teknologi yang diintroduksi. KIMBis juga berupaya mendorong tumbuhnya *entrepreneurship* dalam masyarakat nelayan/pesisir sehingga mampu memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini tidak jauh berbeda dari pendapatnya Sumodiningrat dalam Mardikanto dan

Soebiato (2012:32) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, yaitu Modal, Teknologi, Informasi, dan Jaminan pemasaran agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraan. Melihat hal tersebut, menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:65) bahwa sebagai sebuah proses, maka pemberdayaan mempunyai tiga tahapan, yaitu Penyadaran, Pengkapasitasan, dan Pendayaan.

1) Tahap penyadaran, dalam hal ini berkenaan dengan diberikan pemahaman mengenai hak untuk menjadi berada, bahwa pemberdayaan mengharuskan muncul dan berasal dari diri sendiri. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.
2) Tahap pengkapasitasan, dalam hal ini berkenaan dengan diberikannya pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis dengan tujuan untuk meningkatkan *life skill*. Sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatan dalam mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya.
3) Tahap pendayaan, dalam hal ini berkenaan dengan diberikannya peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya,

diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan.

Berdasarkan tiga tahapan pemberdayaan sebagai sebuah proses di atas, maka akan dapat dideskripsikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KIMBis di Kabupaten Lamongan ke dalam 5 (lima) komponen dari pelatihan dan advokasi pada pemberdayaan masyarakat, yaitu Motivasi, Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, Manajemen diri, Mobilisasi sumberdaya, dan Pembangunan dan pengembangan jejaring (Suharto, 1997 dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:170).

1) Motivasi

KIMBis melakukan pendampingan berupa peningkatan kualitas usaha pengolahan garam tradisional dan transfer teknologi pembuatan pakan buatan dan pemijahan lele. Dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan garam rakyat, KIMBis Desa Weru melakukan pendampingan dan pelatihan penguatan kapasitas usaha bagi para pelaku usaha pengolahan garam tradisional berstandar garam konsumsi terutama kelompok Sarem Makmur di Desa Tunggul. Bekerjasama dengan Pusat Penelitian Sumberdaya Laut Pesisir dan Badan Litbang KP. Fokus kegiatan KIMBis dalam pendampingan ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kapasitas usaha pengolahan garam tradisional kelompok Sarem Makmur di Desa Tunggul, sejauh hasil temuan di lapangan garam tradisional Desa Tunggul telah bermetamorfosis menjadi produk garam kemasan dengan terdapat PIRT. Proses pemberdayaan ini sesuai dengan tahap ke dua, tahap pengkapasitasan dikarenakan upaya peningkatkan kapasitas usaha

pengolahan garam tradisional dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan *life skills* kelompok garam.

Hal di atas tidak jauh berbeda dengan upaya pendampingan yang dilakukan KIMBis melalui transfer teknologi pembuatan pakan buatan dan pemijahan lele bagi kelompok budidaya lele di Kecamatan Paciran. Hasil temuan di lapangan, sejauh ini usaha budidaya lele memang tergolong butuh biaya cukup besar untuk pakan, sehingga ini berakibat terhadap biaya yang dikeluarkan terutama bagi pembudidaya yang kurang berdaya. KIMBis dalam kegiatannya, membantu kelompok pembudidaya lele dengan transfer teknologi inovasi pembuatan pakan alternatif. Hal ini dikuatkan bahwa di Kecamatan Paciran sumber bahan baku seperti dedak, tepung, bungkil kedelai, minyak ikan dan limbah pengolahan hasil perikanan tangkap sangat melimpah. Oleh karena itu KIMBis bersama pembudidaya melakukan kegiatan pembuatan pakan ikan alternatif untuk kebutuhan pakan budidaya ikan. KIMBis dalam kegiatannya mengadakan pelatihan dengan peserta pembudidaya lele di Kecamatan Paciran, sebagai tindak lanjutnya pendampingan terus terjalin meskipun dalam kapasitas komunikasi pengurus dengan pembudidaya saja. Proses pemberdayaan ini tidak jauh berbeda dengan pendampingan sebelumnya dan sesuai dengan tahap ke dua, tahap pengkapasitasan.

2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Sejauh hasil dari pengamatan di lapangan, masyarakat di lokasi terutama ibu-ibu pengolah hasil perikanan skala kecil yang berasal dari desa kelompok sasaran KIMBis yaitu Desa Weru, Paloh, Waru Lor, dan Sidokumpul didampingi

dalam proses pembuatan produk hasil perikanan. Seperti diketahui, Desa Weru Komplek Kecamatan Paciran merupakan salah satu sentra industri pengolahan produk perikanan skala rumah tangga di Kabupaten Lamongan, berbagai macam produk olahan telah dihasilkan oleh masyarakat setempat, namun produk olahan masih berkualitas rendah, hal ini diakibatkan oleh adanya bahan baku yang kurang baik, sedangkan proses produksi masih bersifat sederhana dan belum higienis. Pada aspek pemasaran, pasar masih terbatas di lokal dan tanpa *branding*, sehingga *bargaining position* persaingannya kurang. Sehingga, langkah utama yang dilakukan pengurus KIMBis adalah melakukan peningkatan keterampilan para pengolah di lokasi KIMBis di Desa Weru Komplek melalui pelatihan-pelatihan. Proses pemberdayaan ini sesuai dengan tahap kesatu, tahap penyadaran. Selain itu, telah mengarah ke tahap kedua, tahap pengkapasitasan.

Selanjutnya, KIMBis Kabupaten Lamongan telah melakukan pendampingan dalam rangka meningkatkan *image product* dan daya saing melalui pengemasan dan usaha peningkatan jaringan pemasaran. KIMBis Desa Weru dalam kegiatannya juga bertindak sebagai fasilitator pengurusan sertifikasi PIRT (Ijin Pangan Industri Rumah Tangga) dalam rangka peningkatan daya saing pasar selain peningkatan kualitas dan jaminan mutu produk, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Sejauh dari hasil pengamatan di lapangan, sebanyak 16 (enam belas) pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala rumah tangga telah dilakukan pembinaan oleh KIMBis kaitannya sanitasi dan higienitas produk olahan agar pelaku usaha dapat memenuhi standar usahanya. Survey dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan untuk sertifikasi ijin PIRT tersebut,

hasilnya semua 16 usaha binaan KIMBis dinyatakan layak mendapatkan sertifikasi PIRT yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Dimilikinya PIRT bagi pelaku usaha, merupakan salah satu bentuk pengakuan dari Dinas Kesehatan selaku Instansi yang berwenang memberikan ijin keamanan pangan, dengan PIRT keamanan pangan industri rumah tangga terjamin kualitasnya sehingga konsumen percaya dan tertarik. Kendati demikian, sampai 2014 ini wujud upaya KIMBis terkait sertifikasi PIRT sehingga pelaku usaha di kawasan Weru komplek dikatakan layak ijin hanya dilakukan selama 1 (satu) kali oleh pengurus, selain masalah kelayakan usaha adalah kurangnya informasi penting mengenai PIRT bagi usaha pangan, waktu pelatihan hingga 2 hari bagi calon penerima, juga anggaran untuk mendapatkan ijin pangan tersebut. Proses pemberdayaan ini sesuai dengan tahap kedua, tahap pengkapasitasan dikarenakan masyarakat pelaku usaha desa Weru telah dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya yang berada di luar komunitasnya dengan diperlengkapi PIRT.

3) Manajemen diri

KIMBis berperan menjadi fasilitator permohonan kebutuhan teknologi baik dari Balitbang KP ataupun sumber lain. Dalam kaitannya dengan pendampingan, KIMBis desa Weru selain sebagai fasilitator transfer teknologi dari Balitbang KP juga melakukan pendampingan secara teknis berupa pendampingan pembuatan proposal kebutuhan teknologi yang pernah diajukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dan Provinsi Jawa Timur, masyarakat diberikan pemahaman terkait keterbatasan dalam dirinya sehingga mampu merubah perilaku dan produktifitas, meskipun sejauh ini masih dilakukan

dalam bentuk teknis berupa proposal permohonan kebutuhan. Proses pemberdayaan ini tidak sesuai dengan tahap manapun dikarenakan menurut pengamatan penulis, langkah meminta bantuan kurang tepat dilakukan dalam pemberdayaan, termasuk pada kegiatan KIMBis kecuali kepada Balitbang KP sebagai satuan kerja BBPSEKP.

4) Mobilisasi sumberdaya

Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber belum dilakukan pada proses kegiatan pendampingan KIMBis Kabupaten Lamongan, tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial sejauh ini belum tersentuh oleh adanya kegiatan ini, sebab warga desa Weru tidak cenderung berkeinginan menjalankan usahanya sendiri-sendiri hingga menjadi *home industry*.

5) Pembangunan dan pengembangan jejaring

Dalam rangka membuka akses terhadap peluang pasar berupa pameran dan pemasaran keliling. KIMBis Desa Weru telah berupaya mengenalkan dan melakukan penjajakan pasar, berkoordinasi ke beberapa tempat pemasaran hasil perikanan. Termasuk didalamnya adalah keikutsertaan dalam berbagai kegiatan promosi seperti pameran untuk mempromosikan pengolahan produk yang telah dihasilkan KIMBis desa Weru kepada masyarakat setempat.

Sejauh ini, komunikasi telah dibangun sebagai bagian dari upaya mencarikan sumber-sumber dan peluang bagi masyarakat sasaran dari luar berupa Pasar dan jaringan kerjasama misalnya Perguruan Tinggi dan LSM. KIMBis melakukan penjajagan terhadap pangsa pasar diantaranya adalah PT. Tridian

(Puskoppas Jawa Timur), Masjid Agung Surabaya, Puspa Agro Sidoarjo, dan *outlet* hasil olahan perikanan milik Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain itu, pameran juga dilakukan dengan maksud selain kaitannya dengan pemasaran adalah pengenalan produk hasil kegiatan KIMBis, dilakukan dalam *event-event* tertentu, Hari Nusantara tingkat Provinsi, kegiatan perikanan, pameran dalam rangka Gempita Regional II, pameran di Jakarta diantaranya pameran di kantor BBPSEKP dan pameran KIMBis *Expo* serta pameran KIMBis bersama pelaku usaha. Dinas Kelautan dan Perikanan biasa menginformasikan ketika ada acara di Kabupaten Lamongan misalnya HJL (Hari Jadi Lamongan) hingga beberapa hari lalu KIMBis dapat untung besar sebesar 3 juta dari penjualan di acara reuni ibu-ibu bank Jatim di Kabupaten Lamongan, secara keseluruhan inisiatif dari seorang asisten manajer klinik bidang promosi dan pemasaran adalah membantu ibu-ibu pengolah untuk dapat dikenal dimasyarakat luas, hingga 6-7 hari harus jualkan produk pulang pergi. Sejauh ini, rutinitas pemasaran melalui pameran memang tidak dilakukan setiap hari, namun upaya pengenalan produk dan akses dari luar menjadi konteks tindak lanjut dari proses produksi pengolahan bagi kelompok pengolah di kawasan Weru komplek.

Selain dari hanya dilakukan penjajagan pasar dan pameran, KIMBis juga dikuatkan dengan komunikasi dunia akademis misalnya Universitas dan sekolah. Sebagai bagian dari upaya menjalin kerjasama dengan masyarakat terutama tenaga ahli dari Universitas. KIMBis telah berkomunikasi kepada Perguruan Tinggi meskipun masih dalam rangka diskusi-diskusi kecil dan koordinasi serta inisiatif dari pihak Universitas, namun beberapa diantaranya juga sudah

melakukan wujud kegiatan, adapun Perguruan Tinggi dan sekolah yang pernah berkomunikasi dengan KIMBis diantaranya adalah Hangtuah Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura, Unair Surabaya, dan SMK Sidayu Kabupaten Gresik. Universitas Hangtuah Surabaya dan Universitas Trunojoyo merupakan Perguruan Tinggi yang sejauh ini terjalin komunikasi dan telah melakukan kegiatan. Universitas Hangtuah menyentuh kegiatan pengasapan ikan sebagai nilai tambah pada kelompok masyarakat nelayan di desa Weru. Sedangkan Universitas Trunojoyo berkegiatan daur ulang limbah menjadi biogas, namun sayangnya alat yang diberikan kepada warga desa Weru masih belum bisa diterima akhirnya dipindahkan ke kawasan desa Kranji. Proses pemberdayaan ini sesuai dengan tahap ke dua, tahap pengkapasitasan dikarenakan pelaku usaha dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatan dalam mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya.

Berdasarkan deskripsi bentuk-bentuk kegiatan pendampingan dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan melalui KIMBis di Desa Weru di atas, wujud pendampingan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk kelautan yang dirancang kepada semangat *entrepreneurship* di dalam masyarakat nelayan/pesisir dimaksudkan agar dapat memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat. Melalui hal itu, kegiatan pendampingan ini dapat dikatakan telah sampai di tahap kedua dalam proses pemberdayaan, yaitu tahap pengkapasitasan. Pada tahap ini, berkenaan dengan diberikannya pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis dengan tujuan untuk meningkatkan *life skills*. Sekaligus

dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatan dalam mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya. Dalam rangka itu, ada tidaknya KIMBis di Desa Weru sebenarnya tidak begitu signifikan terhadap kegiatan usaha perikanan berupa pengolahan, hal ini dikarenakan Desa Weru telah memiliki sejarah panjang dalam proses produksi hasil tangkap dan merupakan kawasan sentra hasil olahan perikanan tangkap laut di pesisir Kabupaten Lamongan. Meskipun begitu, beroperasinya KIMBis di Kabupaten Lamongan telah berupaya dalam mendukung industrialisasi perikanan dan kelautan melalui peningkatan pengetahuan kepada kelompok masyarakat nelayan yang menjadi sasaran KIMBis, transfer gagasan dan inovasi dari Balitbang KP, mengadakan pelatihan-pelatihan, dan mengadvokasi kepada sumber-sumber di luar berupa pasar dan jaringan kerjasama.

c. Kegiatan Konsultasi pada KIMBis Sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Konsultasi dalam kegiatan KIMBis menjadi salah satu aspek penting, dikarenakan menjadi bagian dari sarana interaksi memadai diantara kelompok masyarakat nelayan dengan *stakeholders* terkait agar diperolah gambaran pemecahan masalah dan umpan balik komunikasi. Dasar tersebut dikuatkan melalui definisi yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) pembentukan, bahwa Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) adalah wadah komunikasi, advokasi/ pendampingan, serta konsultasi antara kelompok masyarakat nelayan yang beraktivitas di daerah pesisir dengan *stakeholders* terkait. Menyadari hal ini, konsultasi tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat pada

lembaga, termasuk menjalankan kegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan. Terlebih dari itu, pendekatan pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebiato (2012:161) bahwa Pendekatan Mikro dalam pemberdayaan dilakukan terhadap klien individu melalui bimbingan, konseling, *stress management* dengan tujuan utama adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya, sejalan dengan hal tersebut Suharto (2002) mengingatkan, bahwa konsultasi dilakukan sebagai bagian dari kerjasama yang saling melengkapi antara sistem klien dan pekerja sosial dalam proses pemecahan masalah. Melalui hal itu, sejauh dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan, ternyata pengurus KIMBis bukanlah tenaga ahli yang dibentuk dan mampu mengelola ataupun membahas segala hal kaitannya problematika kelautan dan perikanan secara luas. Pengurus KIMBis di Kabupaten Lamongan ditetapkan oleh BBPSEKP sebenarnya didasarkan atas faktor kesediaan dan domisili serta memahami karakteristik lokasi. Karakteristik desa Weru merupakan masyarakat nelayan yang kehidupannya secara langsung berhubungan dengan laut, pada kesempatan itu, pengolahan dan pemasaran adalah target yang hendak dibidik oleh adanya kegiatan ini. Melihat hal ini, muncul suasana dilematis dalam kelembagaan tersebut. Hal inilah, yang menyebabkan ketika interaksi dalam pelatihan diadakan, lebih banyak mendatangkan tenaga ahli dari luar kepengurusan KIMBis.

Sejauh dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan, aktivitas konsultasi pada kegiatan KIMBis di desa Weru dilakukan dengan teknik wawancara (dialog) antara masyarakat kelompok nelayan dengan *stakeholders* terkait di tempat kegiatan. Dialog dilakukan pada saat penyampaian materi

pelatihan berakhir, masyarakat dipersilahkan untuk berinteraksi bersama *stakeholders* terkait yang dihadirkan dengan melihat gambaran umum permasalahan seputar produk usaha dari pelaku usaha dan kebutuhan kelompok sasaran dari adanya inovasi hasil perikanan dan teknologi pendukung produksi. Teknik konsultasi ini biasa terjadi dan diadakan di kegiatan-kegiatan pelatihan dengan menghadirkan tokoh, *stakeholders*, ahli, ataupun narasumber yang sesuai dengan tema kebutuhan kelompok sasaran, baik di kawasan Weru Komplek ataupun di wilayah lain dimana kegiatan interaksi (pelatihan) diadakan. Adanya interaksi dalam kaitannya KIMBis sebagai wadah komunikasi serta konsultasi, maka timbal balik/umpan balik komunikasi seketika dari pengguna dan fasilitator sumber teknologi muncul secara bersamaan pada kegiatan ini. Sehingga, komunikasi dan konsultasi sering dimaknai sama dan sering dipertukarkan satu sama lainnya. Kendati demikian, konsultasi juga dilakukan tidak formal meskipun di ruang-ruang terbuka misalnya ketika bertemu di jalan maupun di laut.

Pengurus sebagai pelaksana tingkat lokasi diharapkan dapat berperan dan mengakomodir berbagai kebutuhan timbal balik berupa penyebaran teknologi inovasi yang dilakukan hasil dari adanya interaksi masyarakat kelompok masyarakat nelayan dengan *stakeholders* terkait. Pada aktivitas tersebut, pengurus dapat menjadi saluran dan tempat berkomunikasi. Kerangka pikir penjaringan berbagai kebutuhan teknologi hendaknya dilakukan tidak hanya pada kegiatan pelatihan berlangsung, melainkan pada suasana-suasana yang tidak formal pengurus bisa mengidentifikasi berbagai kemungkinan inovasi rekayasa teknologi dan inovasi rekayasa sosial yang dapat diterapkan pada lokasi pelaksanaan dan

sekitarnya juga potensi yang dapat diambil dan saling menguntungkan baik pihak sumber teknologi ataupun pihak pengguna teknologi. Melalui hal ini, suasana yang mendukung itu tidak lain adalah penjaringan dan identifikasi kebutuhan teknologi inovasi yang dilakukan dari hasil komunikasi pada pelatihan dan konsultasi timbal balik pada ruang-ruang tidak formal/diadakan. Hal inilah yang dapat menentukan tercapai tidaknya intervensi teknologi inovasi berdasarkan perspektif inisiatif pelaksana lokasi. Dalam banyak hal kepengurusan KIMBis semestinya bukanlah satu-satunya tenaga yang diberikan tanggungjawab besar dari keseluruhan kegiatan, tetapi dalam hal konsultasi pengurus lembaga adalah tenaga yang paling diberikan ruang seluas-luasnya dalam pengelolaan itu. Sejauh ini, aktivitas interaksi secara keseluruhan dalam menjalankan KIMBis dilakukan pada kegiatan pelatihan dan pendampingan mengakibatkan pengurus kurang memahami maksud dan makna komunikasi dan konsultasi.

Garis konsultatif pada kegiatan KIMBis dengan peran fasilitator kebutuhan teknologi pengguna, dilakukan melalui tenaga penghubung atau *liaison officer* (LO). Hal ini dikarenakan berdasarkan ditetapkannya, *liaison officer* (LO) adalah tenaga setempat yang memahami karakteristik lokasi kegiatan dan memiliki kepakaran dalam pemberdayaan masyarakat di lokasi. Sehingga saluran konsultatif dalam lingkup pelaksana pusat dan pelaksana lokasi KIMBis dilakukan dengan mencermati keberpahaman *liaison officer* di lapangan terkait permasalahan yang datang ataupun diajukan dari masyarakat kelompok nelayan yang dengan pemahaman pengurus saja dirasa tidak mampu untuk diselesaikan serta berbagai kebutuhan teknologi yang telah dihimpun dalam kegiatan pelatihan

liaison officer mempunyai kewenangan dalam hal penghubung selain berperan sebagai *public relation*.

d. Ketercapaian Hasil Pemberdayaan Masyarakat Nelayan melalui Kegiatan KIMBis (dilihat pada Kemampuan Ekonomi dan Eksternalitas Sosial)

1) Kemandirian ekonomi berkembang dan orientasi kewirausahaan meningkat

Dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi dan kewirausahaan, adanya kegiatan KIMBis di lokasi studi sejauh ini telah dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha, misalnya Ibu Adibah mengungkapkan bahwa usaha yang digeluti sebagai pendapatan tambahan menjadi meningkat setelah ikut serta dan aktif di KIMBis. Selanjutnya Ibu Ummu Khofifah juga menyebutkan bahwa pada pelatihan yang diadakan KIMBis meskipun ruang lingkup hanya di desa Weru yang mayoritas pengolah, akan tetapi dari hal sepele itu ibu-ibu pengolah dapat memahami maksud dari setiap pelatihan, antara lain menambah penghasilan, semakin fokus dengan potensi, dan jadi mengerti bahan baku hingga pemasaran yang efektif.

2) Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi: informasi, pasar, teknologi, dan jaringan kemitraan

KIMBis melakukan penjajakan komunikasi pasar dan berkoordinasi bersama beberapa tempat pemasaran hasil perikanan, serta berpartisipasi ikut serta dalam berbagai kegiatan berupa pameran. Hal ini dilakukan dengan maksud promosi produk hasil pengolahan yang telah dihasilkan KIMBis dan kegiatannya.

Meskipun sejauh ini signifikansi kepada aspek sumberdaya ekonomi belum dicapai untuk memenuhi kebutuhan sekunder, akan tetapi kontribusi informasi mengenai diversifikasi aneka produk olahan hasil perikanan telah dirasakan oleh masyarakat pengolah di desa Weru. Untuk yang sifatnya jaringan kemitraan yang terjalin hingga dilakukan kegiatan kolektif bidang usaha sejauh ini belum dicapai oleh pelaku usaha, mereka lebih senang berusaha secara mandiri dengan mengembangkan relasi (langganan) hingga di luar kota.

3) Kondisi kualitas SDM berkembang dengan baik

Keberadaan KIMBis di Kabupaten Lamongan telah mampu mencapai peningkatan SDM khususnya ibu-ibu pengolah yang ada di desa Weru, hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan pemahaman mengenai cara-cara produksi hingga pemasaran dari yang awalnya belum mengetahui, belum memiliki usaha pengolahan ikan laut, maka adanya motivasi dan pendampingan dari KIMBis warga desa Weru menjadi mengerti berwirausaha yang didasakan potensi lingkungannya. Proses pengolahan yang dilakukan sejak semula dengan tradisional, maka hingga saat ini masyarakat telah memahami gagasan modernisasi alat pengolahan yang berbasis IPTEK.

4) Potensi sumberdaya lingkungan terpelihara kelestariannya dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan

Proses memahamkan masyarakat nelayan terkait pentingnya hidup bersih serta kelestarian lingkungan, sejauh ini belum maksimal karena pola penerimaan yang diliputi rasa kekhawatiran terhadap teknologi. Meskipun ada upaya, namun

kondisi yang mendukung suasana lingkungan menjadi bersih oleh keberadaan kegiatan KIMBis masih belum tercapai.

2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Kegiatan KIMBis Sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

a. Faktor-faktor Mendukung

Keberadaan KIMBis di Kabupaten Lamongan dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan dengan maksud melangsungkan dua tujuannya, yaitu 1. mempercepat proses diseminasi, adopsi dan difusi teknologi kelautan dan perikanan dan umpan balik dari masyarakat untuk memperbaiki teknologi yang diintroduksi, dan 2. mendorong tumbuhnya *entrepreneurship* dalam masyarakat nelayan/pesisir sehingga mampu memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat, tidak dapat terlepas dari beberapa faktor yang mendukung dari adanya dua tujuan BBPSEKP tersebut.

Faktor pertama yang mendukung pelaksanaan kegiatan KIMBis adalah adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan yang cukup besar diantaranya meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan, keterlibatan dan komitmen Penyuluh, dan dukungan Pemerintah Desa Weru sebagai lokasi pelaksanaan KIMBis. Bentuk dari komitmen tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan terus membangun sosialisasi keberadaan KIMBis diberbagai kegiatannya baik secara formal dan tidak formal serta membangun relasi antar pemangku kepentingan dan memperkuat kelembagaan dengan berbagai fasilitasi dengan SKPD lain (Diskoperindag, pengolah data elektronik (PDE), dan Dinas

Kesehatan) dilakukan sebagai wujud kebertanggungjawaban subjek pada Naskah Perjanjian Kerjasama. Beberapa bentuk dukungan penuh Dinas Kelautan dan Perikanan selain gencar mensosialisasikan KIMBis, juga memfasilitasi KIMBis berupa kendaraan roda empat yang dimodifikasi dapat men-*display* produk olahan perikanan pada saat pemeran diadakan pada lingkup Kabupaten, selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan juga berinisiatif melalui Diskoperindag dengan memberikan bantuan berupa fasilitas peralatan yang diberikan kepada kelompok pengolah binaan KIMBis berupa alat pemotong dan pengupas daging dari duri.

Selanjutnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan telah memberikan *freezer* (kulkas), pengaduk berkapasitas 25 Kg seharga 28 juta dan pemotong. Selain dari adanya dukungan di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan juga berkomitmen penuh pada pembinaan program KIMBis dengan menjadikannya sebagai salah satu program dan kegiatan yang berkelanjutan, 12 tenaga penyuluh juga di siapkan dalam suksesi pelaksanaan kegiatan KIMBis, mengadakan rapat koordinasi secara rutin bagi pengurus KIMBis, Penyuluh, dan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan setiap bulannya, serta adanya dukungan pemerintah Desa Weru sebagai lokasi kegiatan. Adanya komitmen dari Dinas Kelautan dan Perikanan sejak awal Naskah Perjanjian Kerjasama ditandatangani untuk menjalankan KIMBis dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan hingga saat ini telah mendorong dan memantapkan kewirausahaan pada masyarakat Desa Weru yang berbasis pemberdayaan.

Faktor yang mendorong kedua adalah adanya keuntungan dari peran seorang Manajer klinik sebagai penyuluh dan ketua UPT Dinas KP Kecamatan. Ternyata adanya keuntungan ini membuat interaksi dan komunikasi terbangun sekaligus dalam kapasitas manajer KIMBis, juga ketika jabatan publik sedang manajer ini jalankan di masyarakat nelayan. Seperti diketahui tantangan terberat setiap organisasi sebetulnya ada pada unsur birokratis, namun di KIMBis Kabupaten Lamongan ini pelaksana tingkat lokasi menghendaki KIMBis tidak menjadi rumit, secara tidak langsung telah memotong dan merampingkan saluran komunikasi yang berjenjang.

b. Faktor-faktor Menghambat

Selain dari adanya beberapa faktor yang mendukung pada kegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan, juga hadirnya hal-hal yang menjadi penghambat. Faktor pertama yang menghambat adalah kurangnya intensitas komunikasi diantara masyarakat dengan stakeholder. Sejauh temuan di lapangan menunjukkan, adanya kualitas dialog komunikasi dari masyarakat nelayan dengan *stakeholders* terkait pada lembaga KIMBis dilakukan lebih besar pada kegiatan pelatihan mengakibatkan kurangnya intensitas berkomunikasi di kegiatan pemberdayaan. Sehingga, penjaringan dan penerapan berbagai aspirasi kebutuhan teknologi inovasi dari BBPSEKP menjadi kurang didapatkan dan proses dalam meningkatkan kapasitas kewirausahaan menjadi belum optimal.

Faktor yang menghambat kedua adalah *tool* penunjang operasionalisasi KIMBis berupa petunjuk teknis kegiatan dianggap pelaksana lokasi kurang sesuai dengan lokasi atau realitas di lapangan. Berdasarkan temuan di lapangan, sejauh

ini Dinas Kelautan dan Perikanan telah mencatat beberapa kelemahan konsep KIMBis yang ditetapkan pusat, yaitu wilayah kerja, kepengurusan, dan kesesuaian tujuan sejak semula KIMBis dibentuk.

Faktor yang menghambat ketiga adalah adanya resistensi dan respon dari masyarakat sasaran. Partisipasi berupa *feed back* kaitannya tindak lanjut pelatihan dari inisiatif masyarakat kelompok nelayan dari sekian kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan dinilai rendah. Sebagai upaya dari pengurus, KIMBis telah terus menerus berinformasi maksud dan tujuan keberadaannya di Desa Weru ataupun menghimbau peserta pelatihan agar berkomunikasi sebagai tindak lanjut pelatihan di waktu menjumpai permasalahan dan ketidakpahaman dalam praktik pengelolaan produknya yang berbasis inovasi.

Faktor yang menghambat keempat adalah belum adanya regulasi lanjutan ataupun kebijakan yang menguatkan KIMBis di Kabupaten Lamongan. Keterpaduan program kerja KIMBis dengan Instansi pemerintah Kabupaten Lamongan menjadi dinamika tersendiri pada aktivitas pemberdayaan masyarakat, hal ini dilakukan dengan maksud agar ada penyelarasan. KIMBis dapat dimanfaatkan bagi Instansi sebagai tempat untuk melaksanakan program pemberdayaan yang terintegrasi, agar setiap kelompok masyarakat mempunyai motivasi untuk membangun usaha ekonomi secara mandiri dan berkelompok. Hasil di lapangan menunjukkan, kekuatan KIMBis Lamongan sejauh ini diletakkan pada Naskah Perjanjian Kerjasama. Melihat hal tersebut, KIMBis seharusnya diperlengkapi regulasi yang menguatkannya di Kabupaten Lamongan agar mendapatkan dukungan dan jaminan pemanfaatan secara bersama.

Selain dari adanya faktor-faktor yang menghambat berlangsungnya proses dioperasikannya KIMBis di Kabupaten Lamongan dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan yang sifatnya operasional, juga terdapat beberapa temuan faktor-faktor yang menjadi penghambat ketercapaian target beroperasinya KIMBis di Kabupaten Lamongan (upaya membangun jaringan kerja dan renovasi teknologi) pada saat penelitian ini dilakukan. Faktor pertama yang menjadi penghambat ketercapaian target KIMBis adalah kurang jelasnya tujuan atau tujuan kurang menarik bagi semua pihak (terutama Dinas Kelautan dan Perikanan beranggapan terjadinya inkonsistensi dari adanya penyampaian perjanjian kerjasama), terjadi kesalahpahaman dalam menyampaikan makna, maksud dan tujuan dari kegiatan pada awal koordinasi. Adanya ketidaksepahaman diantara kedua lembaga, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dan maksud dari Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi (BBPSEKP) berkegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan, tampaknya menjadikan kolektifitas kegiatan kerjasama kurang optimal, kejelasan tujuan atau tujuan kurang menarik bagi pihak Pemerintah Kabupaten Lamongan karena penyampaian tujuan pembentukan KIMBis sejak awal adalah *role model* pemberdayaan dimana masyarakat diharapkan mampu memahami permasalahannya, mampu memecahkannya, intensitas berkonsultasi dan berkomunikasi datang ke klinik (KIMBis) sebagai wadahnya, akan tetapi adopsi inovasi yang sering dimunculkan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, maka konsistensi dari BBPSEKP dinilai kurang oleh Kabupaten Lamongan. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri juga kurang memahami maksud dan tujuan dari adanya KIMBis.

Faktor kedua yang menjadi penghambat ketercapaian target KIMBis adalah lokasi studi atau kegiatan tergolong sebagai masyarakat berkategori yang mayoritas akhir dalam penerimaan terhadap inovasi. Sejauh dari hasil temuan di lapangan dan wawancara. Sikap ataupun karakter warga nelayan Desa Weru untuk menerima inovasi tidak jauh beda dengan masyarakat pada umumnya, diliputi rasa kekhawatiran terhadap hal-hal yang dianggap baru dan cenderung meniru/mengadopsi inovasi jika dilihatnya salah seorang di lingkungannya menerapkan dan telah berhasil. Identifikasi sikap penerimaan terhadap inovasi menjadi perlu diperhatikan, mengingat berhasil tidaknya pengaplikasian ide gagasan untuk saat ini dan dimasa depan ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dapat memahami keuntungan relatif dan kesesuaian dengan norma dari adanya inovasi yang disebarkan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dalam rangka mendukung eksistensi dan ketahanan KIMBis Kabupaten Lamongan di masa depan agar manfaatnya dapat lebih dirasakan masyarakat khususnya nelayan, maka perlu dilihat kemungkinan hadirnya ancaman (*threat*) dan peluang (*opportunity*) di masa depan. Beberapa hal yang menjadi ancaman KIMBis bersifat *sustainability*, meliputi kurang dan lemahnya kualitas komunikasi diantara masyarakat nelayan dengan stakeholder. Diketahui bahwa, KIMBis merupakan lembaga yang berupaya mendorong kepada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat terutama nelayan yang pada dasarnya tidak mampu secara mandiri mengakselerasi produksi dan memberikan nilai tambah, maka hadirnya KIMBis melalui proses komunikasi dan pendampingan dapat menjadi bagian

penting dalam mewujudkan hal tersebut dengan dihadirkannya pula pengurus di lokasi yang telah ditetapkan. Ketika kegiatan komunikasi dan pendampingan tidak mampu dilakukan secara efektif maka bukan tidak mungkin KIMBis hanya akan menjadi sebuah kegiatan formalitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan akan hilang. Sebab ternyata dilokasi studi berdasarkan keterangan yang didapatkan saat penelitian, intensitas komunikasi bersama pengurus dan stakeholder terkait sangat lemah dan kurang, hanya dilakukan pada saat pelatihan berlangsung. Hal yang sama juga dibuktikan bahwa sekretariat KIMBis yang semestinya dapat difungsikan sebagai lembaga pemberlajaran tampaknya tidak difungsikan sebagaimana adanya, hal ini dikarenakan terbatasnya waktu pengurus juga karena terbatasnya kemampuan dan kompetensi pengurus dilokasi. Selain itu, adanya resistensi dan respon dari masyarakat sasaran terhadap kegiatan KIMBis yang hanya disebut sebagai kegiatan biasa yang tidak cukup mampu dirasakan memberikan manfaat yang optimal bagi usaha pengolahan hasil tangkap yang sudah digeluti sejaka lama, anggapan itu dinilai wajar sebab kegiatan KIMBis memang tidak fleksibel kurang dapat memberikan sentuhan dan lemah kreatifitas sehingga masyarakat sulit untuk menerima manfaat dari adanya kegiatan yang cukup penting dalam masyarakat nelayan ini. Kemudian, belum adanya regulasi lanjutan ataupun kebijakan yang menguatkan KIMBis di Kabupaten Lamongan menjadikan kegiatan ini seakan hanya bersifat kegiatan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan saja, padahal telah ada Naskah Perjanjian Kerjasama yang mengikat kuat antara Lamongan dan Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan dalam rangka mewujudkan keberhasilan KIMBis di

Kabupaten Lamongan. Pemerintah Daerah kurang mampu merespon, yang dengan ditandai tidak adanya pemahaman utuh di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan terkait KIMBis, hanya bagian Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) saja yang cukup tahu dan memahami, khususnya kepala bidangnya. Melalui itu, seharusnya stakeholder di Kabupaten Lamongan juga seharusnya memahami KIMBis dan maksud tujuannya beroperasi, sebab ini akan membantu program pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir. Wujud komitmen dalam mendukung KIMBis dapat berupa kebijakan yang mendukung hingga didapatkan pemahamn semua pihak untuk dapat memanfaatkan KIMBis dalam setiap kegiatan perikanan dan kelautan, maupun di luar hal tersebut.

Sedangkan hal-hal yang menjadi peluang KIMBis di masa depan, meliputi keuntungan lebih atau terdapat nilai positif dengan adanya peran manajer klinik sebagai penyuluh dan ketua UPT Dinas KP Kecamatan. Diketahui bahwa, KIMBis dibentuk dipacu untuk dapat menjadi bagian dan cikal bakal kegiatan masyarakat pesisir/ nelayan yang dalam bentuk kerjasama yang dilakukan oleh peneliti-penyuluh-pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat nelayan dengan didukung teknologi dan intervensi teknologi inovasi dari BalitbangKP yang terpilih. KIMBis diberikan peran lebih dalam rangka menghimpun kekuatan kerjasama bersama Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten, swasta, LSM, tokoh masyarakat, dan masyarakat kelompok nelayan. Adanya penyuluh yang juga kebetulan sebagai manajer memudahkan komunikasi dan menjadikan kegiatan KIMBis di Lamongan selangkah lebih didepan dengan jika

dapat dioptimalkan peran tersebut saat ini dan masa depan. Selain itu, adanya dukungan yang besar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan diantaranya meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan, keterlibatan dan komitmen penyuluh, dan dukungan pemerintah Desa Weru sebagai lokasi pelaksanaan KIMBis menjadikan peluang yang dapat dioptimalkan di masa depan. Sebab KIMBis tidak akan mampu eksis dan bertahan jika tanpa dukungan yang diberikan berupa pandangan hingga teknis dari pemerintah dimana lokasi KIMBis beroperasi. Namun yang lebih penting adalah ada tidaknya dan dilanjutkan tidaknya kegiatan ini tergantung pemerintah baru yang berkuasa, jika memang benar pemerintahan baru berupaya terkonsentrasi dengan merubah dan berusaha memindahkan paradigma/ cara pandang pembangunan dari darat ke laut, maka maritim adalah kata kunci keberhasilan pembangunan tersebut. Sehingga, jika pemerintah tetap konsisten dengan komitmennya maka barangkali tidak etis jika KIMBis dihapuskan dari program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan tetapi perlu tindak lanjut dan perbaikan sistem, kepengurusan, dan lokasi sasaran kebijakan.